

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 13 September 2017  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas RKA-K/L Tahun 2018 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi
- Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 40 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI
- B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  2. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);
  3. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari);
  4. DR. Ing. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan);
  5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem);
  6. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan dan Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya);
  7. Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
  8. Ir. Yuyu Rahayu, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan); dan
  9. Ir. Nazir Foad, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut) beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas RKA-K/L Tahun 2018 dan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, dibuka pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Pagu APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebesar Rp8.025.646.692.000,-, yang bersumber dari:
  - a. Rupiah Murni sebesar Rp6.539.792.322.000,-;
  - b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.118.063.685.000,-;
  - c. Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp49.783.500.000,-;
  - d. Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp266.607.185.000,- dan
  - e. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp51.400.000.000,-.

dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp573.955.156.000,-;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp66.990.220.000,-;
- c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sebesar Rp407.691.364.000,-;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebesar Rp1.082.474.152.000,-;
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp2.033.159.356.000,-;
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp1.133.562.466.000,-;
- g. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi sebesar Rp284.837.618.000,-;
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp325.914.960.000,-;
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp416.014.975.000,-;
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp372.606.381.000,-;
- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp320.439.911.000,-;
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya sebesar Rp278.630.287.000,-;
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp214.092.521.000,-; dan
- n. Badan Restorasi Gambut sebesar Rp515.277.325.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada APBN Tahun 2018 sebesar Rp500,72 Miliar. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman untuk membahas kriteria teknis DAK dan alokasi perdaerah, serta mendorong untuk adanya mekanisme perencanaan pengendalian DAK bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan alokasi anggaran tambahan untuk pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

5. Komisi IV DPR RI bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan kunjungan lapangan terkait reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.15 WIB.

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

**DR. IR. SITI NURBAYA, M.Sc.**

**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**  
A-335